

EDUKASI PERENCANAAN EKONOMI SYARIAH DALAM BISNIS DAN KELUARGA PADA PKM INTERNASIONAL APSESI

Irwandi¹, Wahyudi², Ismail³

^{1,2,3}Universitas Islam DDI AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, Polewali Mandar

Alamat Korespondensi: Polewali Mandar, Sulawesi Barat

E-mail: irwandi@ddipolman.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi dan keterampilan praktis masyarakat dalam merencanakan ekonomi syariah pada ranah bisnis dan keluarga. Isu utama yang diangkat adalah rendahnya pembiasaan pencatatan keuangan, pencampuran keuangan usaha dan rumah tangga, serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kegiatan dilaksanakan melalui seminar, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan refleksi terarah pada PKM internasional APSESI di Purwakarta. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, penyampaian konsep, diskusi kasus, dan evaluasi kualitatif berdasarkan partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif membantu peserta memahami pentingnya pemisahan keuangan, prioritas kebutuhan, perencanaan dana darurat, zakat-infak-sedekah, serta etika bisnis syariah. Kegiatan ini menegaskan bahwa literasi ekonomi syariah perlu disampaikan secara aplikatif agar mudah diterapkan oleh keluarga dan pelaku usaha kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Abstract

This community service program aimed to improve public literacy and practical skills in sharia economic planning for business and family contexts. The main issues addressed were limited financial recording habits, the mixing of household and business finances, and the suboptimal application of sharia principles in economic decision-making. The activity was implemented through a seminar, material presentation, interactive discussion, and guided reflection during the APSESI international community service program in Purwakarta. The method consisted of needs identification, material preparation, conceptual delivery, case-based discussion, and qualitative evaluation based on participant engagement. The results indicate that an educational-participatory approach helped participants understand the importance of financial separation, needs prioritization, emergency fund planning, zakat-infaq-sadaqah allocation, and sharia business ethics. This program confirms that sharia economic literacy should be delivered in an applicable manner so that families and small business actors can implement it in daily economic practices.

Kata kunci: bisnis syariah; ekonomi keluarga; literasi keuangan; pengabdian masyarakat; perencanaan syariah.

1. PENDAHULUAN

Perencanaan ekonomi syariah merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat keluarga maupun usaha. Dalam perspektif syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian proses, keadilan transaksi, kebermanfaatan sosial, serta keberlanjutan usaha. Prinsip ini membuat ekonomi syariah relevan untuk menjawab persoalan pengelolaan keuangan masyarakat yang sering berhadapan dengan kebutuhan harian, keterbatasan pendapatan, tekanan konsumtif, dan ketidakpastian usaha. Tanpa perencanaan yang memadai, keluarga dan pelaku usaha mudah terjebak pada pola keuangan reaktif, yaitu menggunakan pendapatan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa menyiapkan perlindungan risiko dan pengembangan masa depan.

Urgensi literasi keuangan semakin menguat karena masyarakat hidup dalam ekosistem ekonomi yang berubah cepat. Kemudahan akses pembiayaan digital, promosi konsumsi, transaksi non-tunai, serta berkembangnya produk keuangan menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan memilih, menimbang risiko, dan menyusun prioritas. Otoritas Jasa Keuangan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025 menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi

perlindungan konsumen dan peningkatan kesejahteraan (Keuangan, 2021). Pada sisi lain, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa penguatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan perilaku keuangan masih menjadi agenda penting, termasuk dalam bidang keuangan syariah (Keuangan & Statistik, 2025). Data dan arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat tetap diperlukan, terutama agar literasi tidak berhenti pada pengetahuan konseptual, melainkan berubah menjadi kebiasaan pengelolaan keuangan.

Dalam konteks keluarga, perencanaan ekonomi syariah mencakup pengaturan pendapatan, pengendalian pengeluaran, penyusunan prioritas kebutuhan, pengelolaan utang, dana darurat, tabungan, investasi halal, serta alokasi zakat, infak, dan sedekah. Keluarga yang memiliki perencanaan keuangan cenderung lebih siap menghadapi kebutuhan pendidikan, kesehatan, kehilangan pendapatan, dan keadaan darurat. Sebaliknya, keluarga tanpa perencanaan cenderung lebih rentan terhadap pemborosan, utang konsumtif, dan kesulitan memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dalam Islam, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan, tanggung jawab sosial, dan penghindaran perilaku berlebihan menjadi nilai penting yang dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan ekonomi keluarga.

Dalam konteks bisnis, perencanaan ekonomi syariah dibutuhkan agar usaha dikelola secara tertib dan etis. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil menjalankan bisnis secara sederhana, tetapi belum seluruhnya melakukan pencatatan modal, biaya produksi, arus kas, piutang, dan laba. Akibatnya, keuntungan usaha sering tidak terlihat jelas karena bercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Masalah ini bukan persoalan kecil, sebab pencatatan yang lemah dapat memengaruhi keputusan harga jual, pembelian bahan baku, penambahan modal, dan pengembangan usaha. Dari sudut pandang syariah, pengelolaan bisnis juga harus menjaga kejujuran, transparansi, amanah, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001).

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga menjadi agenda strategis nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menempatkan penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sektor riil, industri halal, dan keuangan syariah (Syariah, 2019). Bank Indonesia melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 juga menegaskan perlunya penguatan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan (B. Indonesia, 2026). Arah kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, dan akademisi melalui edukasi publik yang mudah dipahami dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema Sharia Economic Planner in Business and Family dilaksanakan sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia (APSESI) dalam rangka penguatan peran akademisi pada pengabdian masyarakat. Berdasarkan dokumen kegiatan, PKM dilaksanakan di Pendopo Taman Maya Datar, Purwakarta, pada 24 Oktober 2025 pukul 15.30-18.00 WIB, dengan format seminar dan diskusi interaktif. Khalayak sasaran mencakup akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan bisnis dan keluarga (APSESI, 2025).

Masalah utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai cara menerapkan prinsip ekonomi syariah secara praktis. Sebagian masyarakat mengetahui istilah ekonomi syariah, tetapi belum tentu memahami cara menghubungkannya dengan anggaran rumah tangga, pencatatan usaha, pengambilan keputusan konsumsi, atau pengelolaan risiko. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menyampaikan teori, tetapi juga untuk memberikan pemahaman aplikatif yang dapat diterapkan oleh keluarga dan pelaku usaha kecil. Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih agar peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman dan permasalahan nyata.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep perencanaan ekonomi syariah, mendorong penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis dan keuangan keluarga, serta memperkuat peran akademisi dalam pengabdian kepada masyarakat. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui penyampaian materi terstruktur, diskusi kasus, tanya jawab, dan refleksi mengenai praktik keuangan yang dapat diterapkan setelah kegiatan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan, hasil, pembahasan, dan implikasi kegiatan PKM internasional APSESI bertema Sharia Economic Planner in Business and Family.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak cukup hanya menyampaikan materi satu

arah. Peserta perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kesulitan, dan praktik keuangan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian, proses edukasi menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Model kegiatan berbentuk seminar dan diskusi interaktif yang menempatkan narasumber sebagai fasilitator pengetahuan, sedangkan peserta menjadi pihak yang aktif mengaitkan materi dengan kondisi ekonomi keluarga dan usaha.

Khalayak sasaran kegiatan terdiri atas akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Dalam konteks kegiatan APSESI di Purwakarta, sasaran juga diarahkan pada komunitas yang memiliki kebutuhan terhadap penguatan pemahaman ekonomi syariah, khususnya dalam bisnis dan keluarga. Pemilihan sasaran dilakukan berdasarkan relevansi tema dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pentingnya pengelolaan keuangan yang halal, tertib, amanah, dan produktif. Kegiatan ini tidak menggunakan seleksi peserta berbasis daftar individual dalam artikel, melainkan menekankan karakteristik sasaran sebagai kelompok penerima manfaat.

Bahan utama yang digunakan dalam kegiatan adalah materi presentasi tentang perencanaan ekonomi syariah, catatan poin diskusi, dan contoh sederhana pencatatan keuangan. Alat yang digunakan meliputi perangkat presentasi, proyektor, pengeras suara, dan dokumentasi kegiatan. Materi disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara teori dan penerapan. Bagian teori mencakup prinsip ekonomi syariah, sedangkan bagian penerapan mencakup pengaturan pendapatan keluarga, pencatatan arus kas, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta etika bisnis syariah.

Rancangan kegiatan terdiri atas lima tahap, yaitu persiapan, pembukaan dan orientasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi-refleksi. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan mitra, penentuan waktu dan tempat, penyusunan materi, serta penyiapan perangkat presentasi. Tahap pembukaan dan orientasi dilakukan untuk menjelaskan tujuan kegiatan dan membangun perhatian peserta terhadap tema. Tahap penyampaian materi berfokus pada konsep dan contoh penerapan perencanaan ekonomi syariah. Tahap diskusi memberi kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan. Tahap evaluasi-refleksi dilakukan untuk melihat pemahaman peserta melalui respons, pertanyaan, dan kesimpulan bersama.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini bersifat deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari dokumen kegiatan, catatan pelaksanaan, observasi partisipasi peserta, dan dokumentasi kegiatan. Observasi diarahkan pada keaktifan peserta, jenis pertanyaan yang muncul, dan relevansi diskusi dengan materi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi informasi, pengelompokan tema hasil diskusi, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini sejalan dengan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) yang menekankan proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

Kinerja kegiatan dinilai dari beberapa indikator. Pertama, terlaksananya kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua, tersampainya materi utama mengenai perencanaan ekonomi syariah dalam bisnis dan keluarga. Ketiga, adanya partisipasi peserta dalam diskusi dan tanya jawab. Keempat, munculnya pemahaman praktis tentang pemisahan keuangan, pencatatan sederhana, pengelolaan kebutuhan, dan etika bisnis. Kelima, tersusunnya rekomendasi tindak lanjut berupa penguatan edukasi literasi ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Tabel 1 Rancangan pelaksanaan kegiatan

Tahap	Kegiatan	Output yang Diharapkan
Persiapan	Koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, penyiapan alat presentasi, dan penyesuaian tema kegiatan.	Materi dan perangkat kegiatan siap digunakan.
Orientasi	Pembukaan, penjelasan tujuan, dan penguatan urgensi perencanaan ekonomi syariah.	Peserta memahami arah dan manfaat kegiatan.
Penyampaian Materi	Pemaparan konsep ekonomi syariah, perencanaan keuangan keluarga, dan pengelolaan bisnis syariah.	Peserta memperoleh pemahaman konseptual dan praktis.
Diskusi Interaktif	Tanya jawab, pembahasan kasus, dan refleksi masalah keuangan keluarga serta usaha.	Muncul pertukaran pengalaman dan solusi praktis.
Evaluasi dan Refleksi	Penarikan kesimpulan, penegasan praktik yang dapat diterapkan, dan rekomendasi tindak lanjut.	Terbentuk pemahaman dan komitmen penerapan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM internasional APSESI bertema Sharia Economic Planner in Business and Family terlaksana dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif. Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Pendopo

Taman Maya Datar, Purwakarta, pada 24 Oktober 2025 pukul 15.30-18.00 WIB. Berdasarkan susunan acara, kegiatan ini menjadi salah satu agenda PKM internasional yang dirangkaikan dengan pertemuan APSESI dan kegiatan akademik internasional. Kegiatan diposisikan sebagai ruang berbagi ilmu antara akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan nyata.

Materi disampaikan dengan menekankan bahwa perencanaan ekonomi syariah tidak boleh dipahami sebagai konsep abstrak yang hanya relevan bagi lembaga keuangan. Justru, ekonomi syariah perlu hadir dalam keputusan harian keluarga dan pelaku usaha. Contoh yang digunakan dalam pembahasan meliputi penyusunan anggaran rumah tangga, pengendalian belanja konsumtif, pemisahan keuangan usaha dan keluarga, pengelolaan utang, perencanaan sedekah, serta pencatatan sederhana untuk mengetahui laba usaha. Penekanan ini penting karena masyarakat sering kali lebih mudah menerima materi ketika dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari.

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan dalam sesi diskusi. Pertanyaan yang muncul menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan keluarga dan bisnis merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Beberapa topik yang menjadi perhatian adalah cara menentukan prioritas kebutuhan, bagaimana menghindari pemborosan, bagaimana mengatur modal usaha agar tidak tercampur dengan kebutuhan rumah tangga, dan bagaimana menerapkan prinsip syariah ketika menghadapi kebutuhan pembiayaan. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah perlu disampaikan melalui contoh konkret, bukan hanya definisi normatif.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa forum pengabdian berbasis asosiasi keilmuan memiliki nilai strategis. Kolaborasi APSESI membuka ruang bagi akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam edukasi publik. Kegiatan semacam ini dapat mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu ekonomi syariah tidak berhenti sebagai kajian kampus, tetapi menjadi panduan praktis dalam membangun perilaku ekonomi yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Tabel 2 Pokok materi kegiatan

No	Pokok Materi	Uraian Pembahasan
1	Konsep ekonomi syariah	Prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, keseimbangan, dan larangan riba, gharar, serta maisir.
2	Perencanaan keuangan keluarga	Pengaturan pendapatan, prioritas kebutuhan, dana darurat, tabungan, investasi halal, dan alokasi sosial.
3	Pengelolaan bisnis syariah	Pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan arus kas, etika transaksi, dan transparansi usaha.
4	Pencatatan keuangan sederhana	Pencatatan pemasukan, pengeluaran, modal, utang-piutang, saldo, dan laba secara berkala.
5	Refleksi dan diskusi kasus	Pembahasan persoalan nyata peserta terkait keuangan keluarga, usaha, dan penerapan prinsip syariah.

3.2 Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan Ekonomi Syariah

Hasil utama kegiatan terlihat pada meningkatnya kesadaran peserta bahwa perencanaan ekonomi syariah mencakup aspek spiritual, sosial, dan manajerial. Sebelum materi dijelaskan, ekonomi syariah sering dipersepsikan secara sempit sebagai urusan bank syariah atau produk pembiayaan. Setelah pemaparan dan diskusi, peserta diarahkan untuk memahami bahwa ekonomi syariah juga mencakup cara keluarga membuat anggaran, cara pelaku usaha menghitung keuntungan, cara masyarakat menghindari transaksi yang merugikan, dan cara setiap individu mengelola harta secara bertanggung jawab.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi keuangan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku. Lusardi dan Mitchell (Lusardi & Mitchell, 2014) menjelaskan bahwa literasi keuangan memengaruhi kemampuan individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam konteks syariah, kemampuan mengambil keputusan tersebut perlu dilengkapi dengan pertimbangan halal, adil, dan maslahat. Artinya, keputusan ekonomi yang baik bukan hanya keputusan yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga keputusan yang tidak merugikan pihak lain dan tidak melanggar prinsip syariah.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian besar adalah pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha. Dalam praktik usaha kecil, pencampuran keuangan sering dianggap wajar karena usaha dikelola oleh anggota keluarga. Namun, kebiasaan tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mengetahui laba sebenarnya. Materi kegiatan menegaskan bahwa pemisahan keuangan tidak harus rumit. Langkah awal dapat dimulai dengan buku kas sederhana, amplop terpisah, rekening

berbeda, atau catatan digital dasar. Hal penting adalah adanya disiplin membedakan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan uang untuk keberlanjutan usaha.

Selain itu, peserta juga diajak memahami pentingnya dana darurat. Dalam keluarga dan usaha, risiko ekonomi dapat muncul dalam bentuk sakit, penurunan penjualan, kerusakan alat, gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana darurat dalam perspektif perencanaan ekonomi syariah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlangsungan kehidupan dan menghindari ketergantungan pada utang konsumtif. Dengan dana darurat, keluarga dan pelaku usaha memiliki ruang bernapas ketika menghadapi tekanan ekonomi. Rupanya, bahkan uang pun butuh tempat parkir yang jelas, bukan sekadar lewat sebentar lalu menghilang secara misterius.

Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam perencanaan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dikelola untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Alokasi sosial perlu direncanakan agar menjadi kebiasaan yang berkelanjutan, bukan hanya tindakan spontan. Dengan memasukkan zakat, infak, dan sedekah ke dalam rencana keuangan, masyarakat dapat menumbuhkan perilaku ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga peduli terhadap sesama.

3.3 Relevansi Materi dengan Pengelolaan Bisnis dan Keluarga

Materi kegiatan relevan dengan kebutuhan masyarakat karena menyentuh dua ruang ekonomi yang paling dekat, yaitu keluarga dan usaha. Keluarga merupakan unit ekonomi terkecil yang menentukan pola konsumsi, tabungan, pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang. Bisnis, terutama usaha mikro dan kecil, menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga. Keduanya saling berhubungan. Ketika bisnis tidak dikelola dengan baik, kondisi keluarga ikut terganggu. Sebaliknya, ketika pengeluaran keluarga tidak terkendali, modal usaha dapat ikut terkuras.

Pada aspek keluarga, materi menekankan penyusunan prioritas kebutuhan. Prioritas dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, kewajiban, dana perlindungan, tabungan, pengembangan diri, dan kebutuhan sosial. Pembagian ini membantu keluarga menghindari keputusan konsumsi yang hanya didorong oleh keinginan sesaat. Dalam ekonomi syariah, pengendalian konsumsi memiliki dasar nilai yang kuat karena Islam mendorong keseimbangan dan melarang perilaku berlebihan. Dengan memahami prioritas, keluarga dapat lebih bijak dalam menggunakan pendapatan dan menyiapkan masa depan.

Pada aspek bisnis, materi menekankan etika transaksi dan pencatatan. Etika transaksi meliputi kejujuran dalam informasi produk, kesepakatan harga yang jelas, kualitas barang yang sesuai, dan tidak mengambil keuntungan melalui penipuan. Pencatatan meliputi modal awal, biaya produksi, biaya operasional, penjualan, laba, utang, dan piutang. Kedua aspek ini saling melengkapi. Etika menjaga keberkahan dan kepercayaan, sedangkan pencatatan menjaga keberlanjutan usaha. Bisnis yang jujur tetapi tidak tercatat tetap berisiko sulit berkembang; bisnis yang tercatat tetapi tidak etis akan kehilangan kepercayaan.

Materi juga relevan dengan arah pengembangan ekonomi syariah nasional yang menempatkan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah. KNEKS menekankan penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, usaha mikro, dan ekonomi digital sebagai pilar pengembangan ekonomi syariah (Syariah, 2019). Kegiatan PKM ini mendukung agenda tersebut pada tingkat mikro melalui penguatan literasi dan perilaku ekonomi masyarakat. Walaupun skala kegiatannya terbatas, kontribusinya penting karena perubahan perilaku ekonomi sering dimulai dari edukasi sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Dalam pembahasan, peserta diarahkan untuk menyusun langkah praktis setelah kegiatan. Langkah tersebut meliputi membuat daftar pendapatan dan pengeluaran bulanan, menentukan batas belanja konsumtif, memisahkan uang usaha dan uang keluarga, mencatat transaksi usaha harian, menghitung laba bersih, dan menyisihkan dana sosial. Langkah-langkah ini dapat diterapkan tanpa menunggu aplikasi canggih atau sistem akuntansi rumit. Kuncinya adalah kemauan memulai dari catatan sederhana dan dilakukan secara rutin. Teknologi boleh membantu, tetapi disiplin tetap pekerjaan manusia, sayangnya belum ada tombol otomatis untuk itu.

3.4 Dampak Kegiatan dan Implikasi Pengabdian

Dampak langsung kegiatan terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi dan munculnya pemahaman bahwa ekonomi syariah bersifat aplikatif. Peserta tidak hanya mendengar materi, tetapi juga mengaitkannya dengan situasi ekonomi keluarga dan usaha. Keaktifan dalam diskusi menjadi indikator bahwa tema yang diangkat sesuai dengan kebutuhan. Diskusi juga

memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan bahasa edukasi yang sederhana, contoh nyata, dan panduan praktis agar prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan.

Dampak lain adalah terbentuknya kesadaran tentang pentingnya pencatatan keuangan. Pencatatan sering dianggap pekerjaan teknis yang merepotkan, padahal pencatatan merupakan dasar pengambilan keputusan. Tanpa catatan, keluarga sulit mengevaluasi pemborosan, dan pelaku usaha sulit mengetahui keuntungan. Melalui kegiatan ini, pencatatan diperkenalkan sebagai alat sederhana untuk menjaga amanah atas harta. Dalam perspektif syariah, pencatatan juga memiliki makna moral karena membantu menghindari ketidakjelasan transaksi dan konflik keuangan.

Implikasi kegiatan bagi perguruan tinggi adalah perlunya memperkuat model pengabdian yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dosen dan akademisi memiliki peran strategis sebagai jembatan antara teori dan praktik. Ilmu ekonomi syariah yang diajarkan di kelas dapat menjadi solusi bagi masyarakat jika disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Pengabdian tidak selalu harus berbentuk program besar dengan perangkat rumit. Forum seminar dan diskusi yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan perubahan pemahaman yang penting, terutama jika diikuti tindak lanjut pendampingan.

Bagi APSESI, kegiatan ini memperlihatkan bahwa asosiasi program studi dapat mengambil peran lebih luas dalam pengembangan literasi publik. Asosiasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah akademik, tetapi juga dapat menjadi motor kolaborasi pengabdian antarperguruan tinggi. Kolaborasi semacam ini memberi manfaat ganda: masyarakat memperoleh edukasi, sedangkan akademisi memperoleh ruang aktualisasi tridarma. Kegiatan internasional juga membuka peluang pertukaran perspektif lintas budaya mengenai penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan keluarga dan bisnis.

Walaupun kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa catatan untuk pengembangan. Pertama, kegiatan lanjutan sebaiknya dilengkapi dengan pre-test dan post-test agar peningkatan pemahaman dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, perlu disiapkan lembar kerja sederhana yang dapat dibawa pulang peserta, misalnya format anggaran keluarga dan format buku kas usaha. Ketiga, kegiatan dapat dikembangkan menjadi pendampingan berkala bagi pelaku usaha kecil. Keempat, publikasi hasil kegiatan perlu diperkuat agar praktik baik dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain.

Tabel 3 Indikator hasil kegiatan

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Pemahaman konsep	Peserta memperoleh gambaran bahwa ekonomi syariah dapat diterapkan pada keluarga dan bisnis.	Materi ekonomi syariah perlu disampaikan secara aplikatif dan kontekstual.
Partisipasi diskusi	Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan dan usaha.	Tema sesuai dengan kebutuhan dan masalah nyata masyarakat.
Pencatatan keuangan	Peserta memahami pentingnya pemisahan dan pencatatan keuangan.	Diperlukan format buku kas sederhana sebagai tindak lanjut.
Etika bisnis	Peserta mendapatkan penguatan tentang kejujuran, transparansi, dan amanah dalam transaksi.	Bisnis syariah perlu menyeimbangkan laba dan keberkahan.
Keberlanjutan program	Kegiatan berpotensi dikembangkan menjadi pelatihan teknis dan pendampingan.	Perlu kolaborasi lanjutan antara asosiasi, kampus, dan masyarakat.

3.5 Rekomendasi Model Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kegiatan, model tindak lanjut yang disarankan adalah pelatihan teknis perencanaan keuangan syariah berbasis lembar kerja. Pelatihan ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas keluarga dan kelas usaha. Kelas keluarga berfokus pada penyusunan anggaran, prioritas kebutuhan, dana darurat, pengendalian utang, tabungan, dan alokasi sosial. Kelas usaha berfokus pada pencatatan modal, arus kas, harga pokok, laba, pemisahan keuangan, dan etika transaksi.

Model tindak lanjut kedua adalah pendampingan terbatas selama satu sampai tiga bulan. Pendampingan dapat dilakukan secara daring atau luring dengan memantau kebiasaan pencatatan peserta. Peserta diminta mengisi buku kas sederhana, lalu mendiskusikan kendala yang dihadapi. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya seminar sekali selesai, karena perubahan perilaku keuangan membutuhkan pembiasaan. Manusia memang jarang berubah hanya karena mendengar satu ceramah, bahkan ketika ceramahnya benar. Karena itu, pendampingan menjadi jembatan antara pengetahuan dan praktik.

Model tindak lanjut ketiga adalah penyusunan modul ringkas Sharia Economic Planner in Business and Family. Modul dapat memuat konsep dasar, contoh kasus, lembar kerja anggaran keluarga, buku kas usaha, daftar periksa transaksi syariah, dan panduan evaluasi bulanan. Modul ini

dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa, komunitas, dan mitra pengabdian. Dengan modul yang sederhana, kegiatan dapat direplikasi di tempat lain tanpa kehilangan arah materi.

Model tindak lanjut keempat adalah integrasi kegiatan dengan program studi ekonomi syariah. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai fasilitator pendampingan di bawah supervisi dosen. Keterlibatan mahasiswa memberi manfaat pembelajaran nyata, sedangkan masyarakat memperoleh dukungan teknis. Program studi juga dapat menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kurikulum berbasis praktik sosial. Dengan demikian, pengabdian masyarakat menjadi ruang pembelajaran dua arah antara kampus dan masyarakat.

Keempat, artikel ini belum menyajikan data kuantitatif mengenai profil peserta, tingkat pendapatan, jenis usaha, atau perubahan perilaku setelah kegiatan. Hal ini disebabkan fokus kegiatan adalah edukasi publik dalam forum kolaboratif. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai kegiatan sebagai bentuk pengabdian yang relevan. Justru keterbatasan ini menjadi dasar untuk merancang program lanjutan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketiga, kegiatan belum dilengkapi pendampingan personal terhadap kondisi keuangan masing-masing peserta. Padahal, persoalan keuangan keluarga dan bisnis memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap orang. Ada peserta yang mungkin membutuhkan pengelolaan utang, ada yang membutuhkan pencatatan usaha, ada yang membutuhkan strategi menabung, dan ada pula yang membutuhkan pemahaman investasi halal. Pendampingan lanjutan akan membantu peserta menerapkan prinsip umum ke dalam kondisi spesifik mereka.

Kedua, evaluasi kegiatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan observasi, dokumentasi, dan dinamika diskusi. Evaluasi tersebut mampu menggambarkan respons peserta, tetapi belum memberikan ukuran kuantitatif mengenai tingkat peningkatan pemahaman. Untuk kegiatan berikutnya, penggunaan pre-test dan post-test sangat disarankan. Instrumen tersebut dapat mengukur perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga dampak program dapat dilaporkan secara lebih kuat.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pelaksanaan dilakukan dalam durasi terbatas, sehingga materi yang disampaikan masih bersifat penguatan awal. Durasi seminar dan diskusi cukup untuk membangun kesadaran, tetapi belum cukup untuk memastikan perubahan perilaku keuangan dalam jangka panjang. Perubahan perilaku membutuhkan pembiasaan, pemantauan, dan pendampingan. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan diperlukan agar peserta dapat mempraktikkan pencatatan keuangan dan memperoleh umpan balik.

3.8 Keterbatasan Kegiatan

Bagi mahasiswa, kegiatan lanjutan yang dikembangkan dari PKM ini dapat menjadi wahana pembelajaran berbasis pengalaman. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam survei kebutuhan, penyusunan materi, pendampingan pencatatan keuangan, dan evaluasi program. Keterlibatan mahasiswa akan melatih kemampuan komunikasi, empati sosial, dan penerapan teori. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi proses pembentukan kepekaan akademik dan tanggung jawab sosial.

Bagi program studi ekonomi syariah, kegiatan ini mendukung pencapaian visi keilmuan dan penguatan rekognisi. Program studi dapat menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan literasi ekonomi syariah. Selain itu, kegiatan kolaboratif dengan APSESI memperkuat jejaring antarperguruan tinggi. Kolaborasi ini penting karena pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi banyak pihak. Tidak ada satu kampus yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan literasi masyarakat sendirian, meskipun brosur akademik kadang terdengar seolah semuanya bisa dilakukan dalam satu semester.

Bagi dosen, kegiatan ini menjadi sarana aktualisasi keilmuan dan penguatan kapasitas sosial. Dosen tidak hanya bertindak sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai narasumber yang membantu masyarakat memahami persoalan ekonomi. Keterlibatan dosen dalam PKM memberi peluang untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat, sehingga pengajaran dan penelitian dapat menjadi lebih relevan. Masalah yang muncul dalam diskusi masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi untuk riset lanjutan, pengembangan bahan ajar, dan penyusunan modul pengabdian.

Kegiatan PKM ini memiliki kesesuaian kuat dengan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memastikan pengetahuan tersebut memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, kampus memiliki peran penting untuk menjelaskan konsep yang

sering dianggap rumit menjadi panduan yang dapat dipraktikkan. Seminar dan diskusi seperti kegiatan ini menjadi media transformasi ilmu dari ruang akademik menuju ruang sosial.

3.7 Kesesuaian dengan Tridarma Perguruan Tinggi

Strategi kelima adalah memanfaatkan teknologi secara bijak. Aplikasi pencatatan keuangan, dompet digital, dan media sosial dapat mendukung pengelolaan keuangan dan pemasaran usaha. Namun, teknologi perlu diarahkan agar tidak justru memperkuat perilaku konsumtif. Peserta perlu memahami bahwa kemudahan transaksi harus diimbangi dengan kontrol pengeluaran. Dalam bisnis, media sosial dapat digunakan untuk promosi yang jujur dan informatif. Dalam keluarga, aplikasi catatan keuangan dapat digunakan untuk memantau pengeluaran. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu pengelolaan, bukan mesin pengurus saldo yang bekerja terlalu rajin.

Strategi keempat adalah memperkuat jejaring sosial dan kelembagaan. Perencanaan ekonomi syariah akan lebih mudah diterapkan jika masyarakat memiliki lingkungan yang mendukung. Perguruan tinggi, asosiasi program studi, masjid, komunitas usaha, koperasi syariah, dan lembaga sosial dapat bekerja sama menyelenggarakan pelatihan lanjutan. Jejaring ini juga dapat membantu masyarakat memperoleh akses informasi, konsultasi sederhana, dan pendampingan usaha. Dengan dukungan kelembagaan, literasi ekonomi syariah tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan edukasi berkelanjutan.

Strategi ketiga adalah menjadikan keluarga sebagai ruang pendidikan ekonomi pertama. Anak dan anggota keluarga lain perlu dilibatkan dalam pemahaman sederhana tentang prioritas, hemat, berbagi, dan tanggung jawab. Pendidikan ekonomi keluarga tidak harus dilakukan melalui ceramah formal, tetapi dapat melalui contoh. Misalnya, keluarga dapat menyusun daftar belanja bersama, membahas alasan menunda pembelian barang tertentu, atau menyisihkan sebagian pendapatan untuk sedekah. Dengan cara ini, nilai ekonomi syariah tidak hanya menjadi pengetahuan orang dewasa, tetapi menjadi budaya keluarga.

Strategi kedua adalah mengubah perencanaan keuangan menjadi kebiasaan kecil yang mudah dilakukan. Kegiatan PKM menekankan bahwa masyarakat tidak harus langsung menggunakan laporan keuangan rumit. Langkah pertama cukup berupa catatan pemasukan dan pengeluaran harian. Setelah kebiasaan ini terbentuk, catatan dapat dikembangkan menjadi klasifikasi kebutuhan pokok, cicilan, biaya pendidikan, dana sosial, tabungan, dan modal usaha. Dalam bisnis kecil, catatan dapat dimulai dari modal, pembelian bahan, penjualan, biaya transportasi, dan keuntungan. Perubahan kecil yang konsisten lebih realistis daripada rancangan besar yang berhenti setelah dua hari, seperti banyak resolusi manusia yang nasibnya tragis.

Strategi pertama yang dapat diterapkan adalah membangun kesadaran bahwa harta merupakan amanah. Kesadaran ini penting karena pengelolaan keuangan sering kali gagal bukan karena tidak adanya pendapatan, melainkan karena tidak adanya kendali. Ketika pendapatan dianggap hanya sebagai alat konsumsi, maka seluruh pemasukan akan habis mengikuti keinginan. Namun, ketika pendapatan dipahami sebagai amanah, keluarga dan pelaku usaha akan terdorong untuk mengelola harta secara lebih bertanggung jawab. Prinsip amanah juga membantu masyarakat memahami bahwa pencatatan keuangan bukan kegiatan kaku, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dimiliki.

Internalisasi nilai ekonomi syariah membutuhkan proses yang lebih panjang daripada sekadar penyampaian definisi. Nilai seperti amanah, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan perlu diterjemahkan ke dalam perilaku ekonomi yang dapat dilihat dan diukur. Pada tingkat keluarga, internalisasi dapat dimulai dari kebiasaan bermusyawarah sebelum membuat keputusan keuangan besar, mencatat kewajiban rutin, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengevaluasi pengeluaran bulanan. Pada tingkat bisnis, internalisasi dapat dilakukan melalui keterbukaan kualitas barang, pencatatan transaksi, pemenuhan janji kepada pelanggan, dan kehati-hatian dalam memilih sumber modal.

3.6 Strategi Internalisasi Nilai Ekonomi Syariah

Tahap kelima adalah publikasi hasil kegiatan. Publikasi tidak hanya berguna untuk kebutuhan akademik, tetapi juga untuk menyebarkan praktik baik. Artikel pengabdian dapat menjelaskan latar belakang, metode, hasil, pembahasan, dan keterbatasan secara jujur. Dokumentasi kegiatan perlu disimpan dengan rapi, tetapi artikel sebaiknya tidak hanya menjadi album foto. Nilai akademiknya terletak pada analisis perubahan pemahaman, relevansi materi, partisipasi peserta, dan rencana tindak

lanjut. Dengan pola tersebut, PKM bertema perencanaan ekonomi syariah dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang lebih terukur dan mudah direplikasi.

Tahap keempat adalah evaluasi berlapis. Evaluasi awal dapat dilakukan melalui pre-test singkat tentang pemahaman ekonomi syariah dan pengelolaan keuangan. Evaluasi akhir dapat mengukur perubahan pemahaman setelah materi. Evaluasi lanjutan dapat dilakukan dua sampai empat minggu setelah kegiatan untuk melihat apakah peserta mulai mencatat keuangan atau memisahkan dana usaha. Evaluasi lanjutan inilah yang sering menentukan keberhasilan sebenarnya, sebab pengetahuan yang tidak dipraktikkan hanya menjadi koleksi kalimat bagus.

Tahap ketiga adalah penggunaan lembar kerja. Lembar kerja yang disarankan terdiri atas format anggaran keluarga, format buku kas usaha, format rencana dana darurat, dan daftar periksa transaksi syariah. Daftar periksa transaksi syariah dapat memuat pertanyaan sederhana: apakah barang jelas, apakah harga disepakati, apakah kualitas disampaikan apa adanya, apakah tidak ada unsur penipuan, dan apakah akad dipahami oleh pihak yang bertransaksi. Pertanyaan seperti ini membantu peserta menilai praktik ekonomi mereka tanpa harus menggunakan istilah fikih yang terlalu berat.

Tahap kedua adalah penyusunan materi berbasis contoh. Materi perencanaan keuangan keluarga dapat menggunakan ilustrasi pendapatan bulanan, pembagian kebutuhan, simpanan, dana darurat, dan alokasi sosial. Materi bisnis dapat menggunakan contoh usaha makanan, pertanian, perdagangan kecil, atau jasa rumahan. Contoh angka tidak perlu besar, tetapi harus realistis. Peserta biasanya lebih mudah memahami pencatatan ketika contoh yang digunakan mirip dengan transaksi yang mereka alami, seperti pembelian bahan, pembayaran transportasi, penjualan harian, dan biaya tidak terduga.

Agar program dapat direplikasi, penyelenggara perlu menyiapkan alur kegiatan yang sederhana tetapi sistematis. Tahap pertama adalah pemetaan kebutuhan melalui percakapan awal dengan mitra. Pertanyaan dasar yang dapat digunakan meliputi kebiasaan mencatat pengeluaran, sumber pendapatan utama, bentuk usaha yang dijalankan, kendala modal, dan pemahaman peserta mengenai transaksi syariah. Pemetaan ini membantu narasumber menyesuaikan contoh kasus dengan kebutuhan lokal. Tanpa pemetaan, materi mudah berubah menjadi kumpulan slide yang terdengar rapi tetapi melayang jauh dari kehidupan peserta.

3.9 Rekomendasi Praktis untuk Replikasi Program

Dengan demikian, replikasi program harus mengutamakan kesederhanaan materi, keterukuran hasil, dan keberlanjutan pendampingan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema Sharia Economic Planner in Business and Family pada PKM internasional APSESI telah terlaksana dengan baik melalui seminar, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan refleksi. Kegiatan ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan bisnis. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar ekonomi syariah, perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan bisnis syariah, pencatatan keuangan sederhana, serta etika transaksi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya pemisahan keuangan keluarga dan usaha, penyusunan prioritas kebutuhan, dana darurat, pencatatan arus kas, serta alokasi zakat, infak, dan sedekah. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa tema kegiatan relevan dengan persoalan nyata masyarakat. Kegiatan ini juga memperkuat peran akademisi dan asosiasi program studi dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dikembangkan dalam bentuk pelatihan teknis dan pendampingan berkala. Penggunaan pre-test dan post-test, lembar kerja pencatatan keuangan, serta modul praktis akan membantu mengukur dampak dan meningkatkan keberlanjutan program. Dengan tindak lanjut yang terencana, edukasi perencanaan ekonomi syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat, tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang halal, tertib, amanah, produktif, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
Indonesia, A. P. S. E. S. (2025). *Laporan PKM Bersama Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah*

- (APSESI): *Sharia Economic Planner in Business and Family*. Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia.
- Indonesia, B. (2026). *Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030*. Bank Indonesia.
- Keuangan, O. J. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J., & Statistik, B. P. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Syariah, K. N. E. dan K. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.